

TESIS

**OPERASI TANGKAP TANGAN PADA PEMBERANTASAN
TINDAK PIDANA KORUPSI BERDASARKAN NILAI
KEADILAN**

(Studi Putusan Nomor 97/Pid/Prad/2017/PN Jkt.Sel)

**Untuk memenuhi sebagian persyaratan guna mencapai gelar Magister
Hukum**



Oleh :

HOIRUR ROSIKIN

NIM. 1321900002

**UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM
SURABAYA
2021**

TESIS
OPERASI TANGKAP TANGAN PADA PEMBERANTASAN
TINDAK PIDANA KORUPSI BERDASARKAN NILAI
KEADILAN
(Studi Putusan Nomor 97/Pid/Prad/2017/PN Jkt.Sel)

Untuk memenuhi sebagian persyaratan guna mencapai gelar Magister
Hukum

Oleh :

HOIRUR ROSIKIN

NIM. 1321900002

UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM
SURABAYA
2021

TESIS

**OPERASI TANGKAP TANGAN PADA PEMBERANTASAN
TINDAK PIDANA KORUPSI BERDASARKAN
NILAI KEADILAN**

(Studi Putusan Nomor 97/Pid/Prad/2017/PN Jkt.Sel)

Diajukan Oleh :

HOIRUR ROSIKIN
NIM. 1321900002


**Telah disetujui Pembimbing untuk diujikan pada:
Surabaya, 11 Januari 2021**

Budiarsih, SH, M.Hum. Ph.D
Pembimbing I



.....

Dr. Yovita Arie Mangesti , SH, MH. CLA
Pembimbing II



.....

TESIS

**OPERASI TANGKAP TANGAN PADA PEMBERANTASAN
TINDAK PIDANA KORUPSI BERDASARKAN
NILAI KEADILAN
(Studi Putusan Nomor 97/Pid/Prad/2017/PN Jkt.Sel)**

Oleh :

HOIRUR ROSIKIN

NIM. 1321900002

Telah Dipertahankan di Depan Penguji dan
Dinyatakan Lulus Pada Ujian Tesis Program Studi Magister Hukum Fakultas
Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Pada Tanggal : Surabaya,..... 2021

Tim Penguji :

Dr. Endang Prasetyawati, S.H., M.Hum.

Ketua

Dr. Erny Herlin Setyorini, S.H., M.H.

Anggota

Dr. Yovita Arie Mangesti, S.H., M.H. CLA

Anggota

Mengesahkan, Fakultas Hukum
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
Dekan,

Dr. H. Slamet Suhartono, S.H., M.H

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Saya yang bertanda-tangan di bawah ini :

Nama : Hoirur Rosikin

NIM : 1321900002

Program : Magister Hukum

Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Menyatakan bahwa “Tesis” yang saya buat dengan judul :

**“OPERASI TANGKAP TANGAN PADA PEMBERANTASAN TINDAK
PIDANA KORUPSI BERDASARKAN NILAI KEADILAN”**

(Studi Putusan Nomor 97/Pid/Prad/2017/PN Jkt.Sel).

Adalah hasil karya saya sendiri dan bukan “Duplikasi” dari karya orang lain. Sepengetahuan saya, di dalam Naskah Tesis ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata di dalam naskah Tesis ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI, saya bersedia TESIS ini digugurkan dan gelar akademik yang saya peroleh dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, tanpa ada paksaan dari siapapun.

Surabaya,.....2021

Hormat saya,

HOIRUR ROSIKIN

NIM. 1321900002

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah swt dan jungjungan besar kita Nabi Muhammad saw atas segala ridha dan karunia yang telah diberikan kepada penulis sehingga penulisan hukum (tesis) ini dapat terselesaikan. Tesis ini merupakan sebagian persyaratan kurikulum untuk mencapai gelar Magister Hukum strata dua di Fakultas Hukum, Program Studi Magister Hukum, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya. Untuk memenuhi persyaratan tersebut, maka ditulis Tesis yang berjudul **“OPERASI TANGKAP TANGAN PADA PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI BERDASARKAN NILAI KEADILAN (Studi Putusan Nomor 97/Pid/Prad/2017/PN Jkt.Sel)”**.

Tesis ini diharapkan dapat memberikan manfaat memperluas wawasan pengetahuan terkait masalah Kepastian Hukum dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi khususnya perihal Operasi Tangkap tangan dan dapat dipergunakan sebaik mungkin untuk kajian bagi kalangan akademisi, penegak hukum, dan masyarakat. Penulis menyadari bahwa tesis dapat diselesaikan berkat dukungan dan bantuan dari berbagai pihak, oleh karena itu penulis berterima kasih kepada semua pihak yang secara langsung maupun tidak langsung memberikan kontribusi dalam menyelesaikan Tesis ini, ucapan terima kasih Penulis sampaikan kepada:

1. Dr. Mulyanto Nugroho, MM., CMA., CPA., selaku Rektor Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
2. Dr. H. Slamet Suhartono, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
3. Dr. Erny Herlin Setyorini, S.H., M.H. selaku Kepala Program Studi Magister Hukum, Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
4. Budiarsih SH., Mhum., Ph.D. selaku Dosen Pembimbing I yang telah dengan sabar bersedia meluangkan waktu dan memberikan segala bantuan, bimbingan, koreksi dan motivasi dalam penyusunan tesis ini.

5. Dr. Yovita Arie Mangesti , SH, MH. CLA. selaku Dosen Pembimbing II yang telah bersedia meluangkan waktu dan memberikan bimbingan, koreksi, motivasi dan doa dalam penyusunan tesis ini.
6. Seluruh bapak dan ibu dosen serta staff tata usaha yang telah memberikan ilmunya dan membantu saya selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
7. Teristimewa untuk kedua orang tua, Istri tercinta Shinta Yuniar Setiaji dan Putra tersayang Moh. Jifan Zhafran Al fatih yang selalu memberikan dukungan, doa dan semangat dalam menyelesaikan studi program Pascasarjana, semoga ilmu yang penulis dapatkan bermanfaat bagi keluarga.
8. Teman-teman Magister Ilmu Hukum Angkatan 41 Universitas 17 Agustus Surabaya. Terima kasih untuk kebersamaan dan semangatnya.

Akhir kata, menyatakan dengan penuh kesadaran bahwa penulisan tesis ini masih memiliki banyak kekurangan atau masih belum sempurna. Oleh karena itu, segala kritik dan saran yang membangun akan sangat diharapkan guna perbaikan di masa yang mendatang.

Surabaya,2021

HOIRUR ROSIKIN

NIM. 1321900002

ABSTRACT

The rise of arrests made by the KPK, known as Operation Catch Hand or OTT, has led to a polemic of whether it is legal or not. This discourse arose at the beginning of the intensity of DPR member Fahri Hamzah, which is known as Operation Catch Hand or OTT, which has led to a polemic whether it is legal or not. The Eradication of Corruption Crime which deserves to be tested for legal certainty, including the Setya Novanto case, the KPK in its defense must have said that the OTT's actions were based on the KPK SOP, however, the regulations of the KPK leaders in the form of SOPs should not conflict with legislation. The purpose of this study is to analyze hand-catching operations (OTT) in the eradication of corruption, whether it reflects the value of justice and to find the concept of eradicating corruption related to the preliminary collection of evidence with Hand Catch Operation (OTT), which is in accordance with the value of justice. The author formulates the problem of whether the eradication of corruption through hand-held operations is in line with the value of justice and how the concept of eradicating corruption is related to the preliminary collection of evidence with OTT in accordance with the value of justice.

The approach method used in this research is to use normative legal research methods, meaning that the issues raised, discussed and described in this study are focused on applying the rules or norms in positive law. The approach to the problem in the preparation of this thesis, namely: The statutory approach (Statute Approach) is carried out by examining all laws and regulations that are related to the legal issue that is being handled, the Conceptual Approach, the approach method by referring to the principles law, which can be found in the views of scholars or legal doctrines, the Case Approach is an approach that is carried out by analyzing cases related to issues at hand which have become court decisions that have legal force which is fixed.

The results of this research found that the implementation of the Hand-Catching Operation conducted by the KPK had not yet provided justice for suspects who were still at the stage of investigation. In essence, OTT is a forced attempt against the rights of citizens, but because it is for the sake of proof that has been regulated in the Law, this action can be justified. If in the process of forced attempts there is a violation of rights committed by the Corruption Eradication Commission, then the suspect can sue for the rights that have been violated through the pretrial process mechanism.

Keyword: *Corruption Crime; Hand-Catching; Justice Value;*

RINGKASAN

Latar belakang penelitian berangkat dari Maraknya penangkapan pelaku Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan oleh KPK, yang dikenal dengan Operasi Tangkap Tangan atau OTT, telah menimbulkan polemik legal atau tidak. Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang kiranya patut diuji kepastian hukumnya, diantaranya Kasus Setya Novanto, KPK dalam pembelaannya pasti mengatakan tindakan OTT berdasarkan SOP KPK, namun demikian, peraturan pemimpin KPK dalam bentuk SOP tidak boleh bertentangan dengan perundang-undangan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis operasi tangkap tangan (OTT) dalam pemberantasan korupsi, apakah mencerminkan nilai keadilan dan untuk menemukan konsep pemberantasan korupsi terkait pengumpulan barang bukti permulaan dengan Operasi Tangkap Tangan (OTT) yaitu sesuai dengan nilai keadilan..Atas dasar latar belakang itu penulis merumuskan pada masalah Apakah Pemberantasan tindak pidana korupsi melalui operasi tangkap tangan telah selaras dengan nilai keadilan dan bagaimana konsep pemberantasan tindak pidana korupsi terkait pengumpulan barang bukti permulaan dengan OTT yang sesuai dengan nilai keadilan.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode penelitian hukum normatif, artinya permasalahan yang diangkat, dibahas dan diuraikan dalam penelitian ini difokuskan dengan menerapkan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Pendekatan masalah dalam penyusunan tesis ini, yaitu : Pendekatan perundang-undangan (Statute Approach) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani, Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach) metode pendekatan dengan merujuk pada prinsip-prinsip hukum, yang dapat diketemukan dalam pandangan-pandangan sarjana ataupun doktrin-doktrin hukum, Pendekatan Kasus (Case Approach) adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap

Hasil penelitian ini menemukan bahwa Pelaksanaan Operasi Tangkap Tangan yang dilakukan oleh KPK masih belum memberikan keadilan bagi tersangka yang masih dalam taraf penyelidikan. OTT pada hakekatnya merupakan upaya paksa terhadap hak-hak warga negara, tetapi karena untuk kepentingan pembuktian yang sudah diatur dalam Undang-Undang maka tindakan tersebut dapat dibenarkan. Apabila dalam proses upaya paksa terjadi pelanggaran hak-hak yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, maka tersangka dapat menuntut atas hak hak yang dilanggar melalui mekanisme proses peradilan.

Kata Kunci : Kejahatan Korupsi; Operasi Tangkap tangan; Nilai Keadilan

DAFTAR ISI

SAMPUL DEPAN	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
LAMBAR PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PERSETUJUAN TESIS	iii
HALAMAN PERSETUJUAN PENGUJI TESIS ..	Error! Bookmark not defined.
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRACK	viii
RINGKASAN	ix
DAFTAR ISI.....	x
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah.....	11
1.3 Tujuan Penelitian	12
1.4. Manfaat Penelitian	12
1.5 Orisinalitas Penelitian	13
1.6 Metode Penelitian	16
1.6.1 Jenis Penelitian.....	16
1.6.2 Pendekatan Penelitian	17
1.6.3 Bahan Hukum.....	18
1.6.4 Metode Pengolahan Bahan Hukum.....	19
1.6.5 Metode Penyajian Bahan Hukum.....	19
1.6.6 Analisis Bahan Hukum	19
1.6.7 Pertanggungjawaban Sistematis.....	20
BAB II LANDASAN TEORI DAN PENJELASAN KONSEP	22
2.1 Landasan Teori.....	22
2.1.1 Teori Tujuan Hukum Gustav Radbruch.....	22
2.1.2 Teori Positivisme	23

2.1.1.1	Teori Hukum Murni (The Pure Theory of Law) Hans Kelsen.....	23
2.1.1.2	Teori Positivisme John Austin (The Command Theory of Law)....	24
2.1	Penjelasan Konsep	26
2.2.1	Penyelidikan dan Penyidikan	26
2.2.2	Operasi Tangkap Tangan	30
2.2.3	Tindak Pidana Korupsi.....	31
2.2.4	Nilai Keadilan	53
BAB III PEMBAHASAN		61
3.1	Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Melalui OOT dilihat dari Prespektif Keadilan	61
3.1.1	Operasi Tangkap Tangan KPK Terhadap Kasus Tindak Pidana Korupsi.....	63
3.1.2	Kasus Praperadilan No 97/Pid/Prad/2017/PN.Jkt.Sel) Dalam Kaitan Dengan Asas Keadilan	72
3.2	Konsep Pemberantasan Tipikor Terkait Pengumpulan Bukti Permulaan dengan Operasi Tangkap Tangan (OTT) Yang Sesuai Dengan Nilai Keadilan.....	93
BAB IV PENUTUP		99
4.1	Kesimpulan	99
4.2	Saran	100
DAFTAR PUSTAKA		102